

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK. 03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT KEBERATAN:

| Nomor : | ••••• | (1) | | . (0) |
|---|--|---|--|--|
| Lampiran: | | | | •••••(4) |
| Yth. Direktur Jendera u.b. Kepala KPP | al Pajak | (4) | | |
| NPWP : . Jabatan : . | Wajib Pajak | | (6) (7) (8) | |
| 1 1 | Wakil ari Wajib Pajak Vama : IPWP : Ilamat : | **************** | .(11) | |
| Nomor dan tanggal | h pihak ketiga *): : : : | | . (13) . (14) . (15) | notongan |
| Alasan pengajuan ket 1. Sengketa Alasan keberatan d 2. Sengketa Alasan keberatan d 3 | an jumlah menuru an jumlah menuru | t Wajib Pajak t Wajib Pajak | | |
| Berdasarkan hal terse a. Jumlah pajak yan pemungutan*) seb b. Jumlah pajak sebesar: c. Jumlah pajak yan pemeriksaan sebes | ebut di atas maka: g terutang menuru esar: yang terutang ng terutang | ıt surat ketetap menurut pe disetujui dalar | pan pajak/pemot erhitungan Wa n pembahasan | tongan atau (18) ajib Pajak (19) akhir hasil |



| | | (21) tanggal(22) dengan NTPN(24) |
|---------------|---|---|
| Lampiran: (25 | 5) | |
| No. | Jenis Dokumen | set/lembar |
| | | |
| | | · |
| Demikian sur | at keberatan kami sampaikan u | ntuk dapat dipertimbangkan. Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**) |
| | | (26) |
| | X pada yang sesuai. ah satu yang sesuai. | • |

3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat pengajuan keberatan

ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEBERATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keberatan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Keberatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani Surat Keberatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Nomor (б) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani Surat Keberatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani Surat Keberatan dan dalam hal keberatan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani Surat Keberatan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani Surat Keberatan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani Surat Keberatan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal Surat Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (10) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak apabila yang menandatangani Surat Keberatan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal Surat Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (11) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani Surat Keberatan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal Surat Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (12) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau jenis bukti potong yang diajukan keberatan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak atau bukti potong yang diajukan keberatan.
- Nomor (15) : Diisi jenis pajak.

- 4 -

Nomor (16) : Diisi Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Nomor (17) : Diisi dengan jelas alasan keberatan untuk masing-masing koreksi

yang diajukan keberatan.

Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan

pajak.

Nomor (19) : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan

Wajib Pajak pada saat pengajuan keberatan.

Nomor (20) : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan

Wajib Pajak yang disetujui pada waktu pembahasan akhir

pemeriksaan.

Nomor (21) : Diisi dengan jumlah pelunasan ketetapan pajak oleh Wajib Pajak

dan dalam hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-

masing jumlah pelunasan.

Nomor (22) : Diisi dengan tanggal pelunasan ketetapan pajak oleh Wajib Pajak

dan dalam hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-

masing tanggal pelunasan.

REMENTERIAN

Nomor (23) : Diisi dengan nama bank tempat pelunasan ketetapan pajak oleh

Wajib Pajak dan dalam hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali

dicantumkan masing-masing tempat pelunasan.

Nomor (24) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai

dalam SSP pelunasan ketetapan pajak oleh Wajib Pajak dan dalam

hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing

NTPN.

Nomor (25) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing

jenis dokumen.

Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa.

Salinan sesuai dengan aslinya

CUNNGAN A

BAGIANTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

HARNO L BIRO UMUM

KEPALA BIRO UMUM

KEPAL

NIP 19590420198402100



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

NIP(14)

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN:

| | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) |
|-----|---|
| Sif | mor : S(2) at :(4) 1 : Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan |
| | 1 (5) |
| | Sehubungan dengan surat yang Saudara sampaikan nomor |
| 1. | Berdasarkan penelitian kami, surat yang Saudara sampaikan tersebut tidak memenuhi ketentuan(12). |
| 2. | Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP, surat yang Saudara sampaikan tersebut bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. |
| 3. | Pemberitahuan ini bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, atas pemberitahuan ini tidak dapat diajukan banding ke badan peradilan pajak. |
| | Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih. |
| | a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK (13) |
| | |

Tembusan: Direktur Jenderal Pajak - 2 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.

Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan jenis dan masa/tahun ketetapan atau pemotongan/pemungutan pajak, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2008, Surat Ketetatapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau bukti pemungutan.

Nomor (10): Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau bukti pemungutan.

Nomor (11): Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang menjadi alasan tidak dipenuhinya persyaratan dalam pengajuan Surat Keberatan oleh Wajib Pajak, yaitu ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (3a), dan/atau Pasal 32 Undang-Undang KUP, dan/atau Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.

Nomor (13): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



- 3 -

Keterangan:

Surat Pemberitahuan tersebut dibuat/dicetak dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut:

a. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak

b. Lembar ke-2 : untuk Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

u.b., KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

STATIATIAN JEX

GIARTO *

NIP 195904201



LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN:

| | (1) | (2) |
|--|--|-------------------------------|
| - | ohonan Pencabutan Pengajuar | n Keberatan |
| - | deral Pajak (4) | |
| Nama NPWP Jabatan Alamat | ngan di bawah ini: : : : : : : : : : : : : : : : : : : | |
| Nomor dan tangga Perihal surat Penandatangan | ajukan pencabutan atas Sura al: : : | (13) (14) (15) |
| | n pengajuan keberatan: | |
| 2 3 | permohonan pencabutan | atas pengajuan keberatan kami |
| | | Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**) |
| Tembusan: | | (18) |

1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Kepala Kanwil DJP(19)



- 2 -

| Ket | A1 | วก | σa | n | ۰ |
|------|--------|----|---------|---|---|
| 1701 | \sim | uu | ,,,,,,, | | • |

1. Beri tanda X pada yang sesuai.

2. *) : Diisi salah satu yang sesuai.

3. **): Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal dalam hal surat pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan pencabutan sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan pencabutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (10): Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (10) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (11): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (11) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (12): Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (12) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keberatan yang diajukan permohonan pencabutan.
- Nomor (14): Diisi dengan perihal Surat Keberatan yang diajukan permohonan pencabutan.

- 4 -

Nomor (15): Diisi dengan nama penandatangan Surat Keberatan yang diajukan permohonan pencabutan.

Nomor (16): Diisi dengan kedudukan penandatangan Surat Keberatan yang diajukan permohonan pencabutan, yaitu Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa.

Nomor (17): Diisi dengan jelas alasan permohonan pencabutan pengajuan keberatan.

Nomor (18): Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

Nomor (19): Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan atasan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEPALA BIRO UMUM

u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

MUMU OPIB

GIARTO* NIP 19590420198402



LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DALAM HAL PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DISETUJUI:

| | DIREK | KEUANGAN REPU TORAT JENDERA | | A |
|----------------------------------|---|--|--|--|
| Hal : Perse | (2) (4) etujuan Permohonan Pe gajuan Keberatan | | | (3) |
| Yth | (5) | | | |
| (7) Pengajuan Keb penelitian kan | an dengan surat Sau yang diterima tanggal . eratan atas Surat Keb (10), dengan ni, sampai dengan di | (8) l peratan nomor n ini disampa iterimanya sura | hal Permohonan ikan bahwa b t permohonan | Pencabutan .(9) tanggal erdasarkan pencabutan |
| | eratan Saudara, Surat pada Saudara sehin lara disetujui. | | | |
| Demikian terima kasih. | disampaikan, atas pe | rhatian dan ker | jasama Saudara | diucapkan |
| | | a.n. D | IREKTUR JENDE | |
| | | NI | P | (12) |

Tembusan: Direktur Jenderal Pajak



PETUNJUK PENGISIAN SURAT JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DALAM HAL PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DISETUJUI

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.

Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (б) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (12): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP, pejabat yang menandatangani surat.



B. FORMAT SURAT JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DALAM HAL PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DITOLAK:

| | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) |
|-----|--|
| Sif | mor : S(2) at :(4) l : Penolakan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan |
| Yti | n (5) |
| Per | Sehubungan dengan surat Saudara nomor(6) tanggal(7) yang diterima tanggal(8) hal Permohonan Pencabutan ngajuan Keberatan atas Surat Keberatan nomor(9) tanggal(10), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: |
| 1. | Berdasarkan penelitian kami, kepada Saudara telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH). |
| 2. | Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Saudara tidak dapat mencabut pengajuan keberatan dan permohonan pencabutan pengajuan keberatan Saudara ditolak. |
| 3. | Pengajuan Keberatan Saudara tetap diselesaikan dengan penerbitan Surat Keputusan Keberatan. |
| ter | Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan imakasih. |
| | a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK(11) |
| | |

Tembusan: Direktur Jenderal Pajak



-4-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DALAM HAL PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DITOLAK

Nomor (1): Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2): Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3): Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4): Diisi dengan sifat surat.

Nomor (5): Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (6): Diisi dengan nomor Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan

Keberatan.

Nomor (7): Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan

Keberatan.

Nomor (8): Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Permohonan Pencabutan

Pengajuan Keberatan.

Nomor (9): Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

dan NIP pejabat yang tanda tangan, nama, Nomor (12): Diisi dengan

menandatangani surat.

Salinan sesuai dengan aslinya

U. D. GUNDAN RECO

KEPALA BIRO UMUM

BACIAN T.U. KEMENTERIAN **KEPALA**

BIRO UMUM

FIAMAT JEST

GIARTO NIP 195004201984021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



Direktur Jenderal Pajak

| \ | <i>y</i> | | | .(1) |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
| Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : | Sangat segera(4) Panggilan Dalam R Klarifikasi Sengket |) langka Pembahasa | an dan | (3) |
| | (5) | | | |
| Jėnis Ketetaj Nomor Keteta | ungan dengan Surat pan/Pemotongan ata apan/Pemotongan at tapan/Pemotongan a Pajak | u Pemungutan*) au Pemungutan*) | : : *) : | (7) |
| klarifikasi at | n ini diharapkan ke as sengketa perpajak l : | tan tersebut, yang | g akan dilaksa (10) (11) | • |
| waktu denga 1 2 3 | ngat pentingnya acar in membawa dokume | en yang diperluka dst (13) | n, antara lain: | |
| terima kasih | | a.n. DIR | EKTUR JEND | |
| Tembusan | | NIF | | (15) |



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4). : Diisi sesuai dengan jumlah lampiran.

Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau

pemungutan seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pengahasilan Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 23.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/pemotongan atau

pemungutan.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak/pemotongan atau

pemungutan.

Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Nomor (9) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.

Nomor (11) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan.

Nomor (12) : Diisi dengan kantor tempat pembahasan akan dilaksanakan.

Nomor (13) : Diisi dengan jenis dokumen yang diperlukan untuk

pembahasan.

Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat

panggilan.

Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat panggilan.

Salinan sesuai dengan aslinya

y Bayba GAH REO

BIRO UMUM

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.O. KEMENTERIAN

18/

NIP 1959042019840210

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN INFORMASI PERTAMA:

Tembusan:

Direktur Jenderal Pajak

| DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1) |
|--|
| Nomor : S(2) Sifat :(4) Hal : Permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi |
| Yth(5) |
| Sehubungan dengan surat Saudara nomor(6) tanggal (7) hal Pengajuan Keberatan atas(8) nomor (9) tanggal(10), dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi, dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> yang meliputi: |
| 1 |
| Buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau s <i>oftcopy</i> tersebut wajib disampaikan kepada: |
| nama : |
| paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim. |
| Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak meminjamkan buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan. |
| Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |
| a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
| |
| NIP(14) |



- 2

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN INFORMASI PERTAMA

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.

Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

- Nomor (8): Diisi dengan jenis dan masa/tahun ketetapan atau pemotongan/pemungutan pajak seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau bukti pemungutan.
- Nomor (10): Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau bukti pemungutan.
- Nomor (11): Diisi dengan jenis buku, data, catatan dan informasi yang dipinjam dari Wajib Pajak.
- Nomor (12): Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan disampaikannya buku, catatan, data, dan informasi.
- Nomor (13): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN INFORMASI YANG KEDUA:

Tembusan:

Direktur Jenderal Pajak

| | | EKTORAT JEN | DERAL PAJAK (1) | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--|------------------------|
| Sifat | : S : Permintaan peminjaman l catatan, data, dan informa | (4) ouku, | | (3) |
| | (5) | | | |
| hal permi sampaika | nubungan dengan surat kan intaan peminjaman buku, an bahwa sampai dengan s /seluruhnya*) atas peminjar | catatan, data, urat ini dikiri | dan informasi, dengai mkan, Saudara tidak i | n ini kami memenuhi |
| | apun buku, catatan, data terdiri dari: | dan informa | isi yang masih harus | Saudara |
| 2 | | | ••• | |
| | ku, catatan, data, dan i tersebut wajib disampaikan | | ım bentuk <i>hardcopy</i> | dan/aṭau. |
| nama jabatan tempat | : : : | | ••••• | |
| paling lan | na 10 (sepuluh) hari kerja se | etelah tanggal | surat ini dikirim. | * |
| buku, cata keberatan | abila dalam jangka waktu tatan, data dan informasi da n Saudara tetap diproses oses penyelesaian keberatan | ılam bentuk <i>h</i> sesuai dengar | ardcopy dan/atau softo | copy, surat |
| Atas | s perhatian dan kerjasamar | nya diucapkan | terima kasih. | • . |
| | | a.n. | DIREKTUR JENDERA | |
| | ٤ | | | |
| | | | NIP | |



- 4 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN INFORMASI YANG KEDUA

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.

Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permintaan peminjaman buku,

catatan, data, dan informasi pertama.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permintaan peminjaman buku,

catatan, data, dan informasi pertama.

Nomor (8) : Diisi dengan jenis buku, catatan, data, dan informasi yang belum

diserahkan Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat

akan disampaikannya buku, catatan, data, dan informasi.

Nomor (10) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.

Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN TAMBAHAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN INFORMASI:

| DIREKTORAT JENDE | |
|--|--|
| Nomor : S | (3) |
| Yth (5) | |
| Sehubungan dengan surat Saudara nomo(7) hal Pengajuan Keberatan a(10), der (10), der kami masih memerlukan tambahan buku, catatan dipinjam dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy y | tas(8) nomor ngan ini disampaikan bahwa n, data, dan informasi untuk |
| 1 | |
| Buku, catatan, data, dan informasi, dalam softcopy tersebut wajib disampaikan kepada: | bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau |
| nama : jabatan : tempat : | (12) |
| Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai denga dalam proses penyelesaian keberatan. | hardcopy dan/atau softcopy, |
| Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan te | rima kasih. |
| a.n. | DIREKTUR JENDERAL PAJAK(14) |
| # | |
| Tembusan. | NIP(15) |

Direktur Jenderal Pajak



6 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN TAMBAHAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN INFORMASI

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

: Diisi dengan nomor surat. Nomor (2)

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.

Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

: Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. Nomor (6)

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (8) dengan : Diisi jenis dan masa/tahun ketetapan atau pemotongan/pemungutan pajak seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008.

- : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau Nomor (9) bukti pemungutan.
- Nomor (10): Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau bukti pemungutan.
- Nomor (11): Diisi dengan tambahan jenis buku, data, catatan dan informasi yang dipinjam kepada Wajib Pajak.
- Nomor (12): Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan disampaikannya buku, catatan, data, dan informasi.
- Nomor (13): Diisi dengan batas waktu peminjaman buku, catatan, data, dan informasi.
- Nomor (14): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat menandatangani surat.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN YANG PERTAMA:

|--|

| | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1) |
|---|--|
| Nomor: S(2) Sifat: (4) Hal: Permintaan keterangan | |
| Yth(5) | |
| (7) hal Per | ırat Saudara nomor(б) tanggal ngajuan Keberatan atas(8), nomor (10), dengan ini disampaikan hal-hal |
| I. Saudara mengajukan kebera Rp (12) | tan atas koreksi(11) sebesar |
| Berkaitan dengan keberatar keterangan sehubungan deng 1 | n tersebut, diminta kepada Saudara memberikan gan koreksi tersebut yang meliputi: |
| 2 3 | |
| II. dst. (sesuai pos yang perlu di | lakukan penjelasan dan atau pembuktian) |
| Keterangan tersebut di ata | as agar disampaikan kepada: |
| jabatan : | (14) |
| paling lama 15 (lima belas) hari | kerja setelah tanggal surat ini dikirim. |
| | aktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan beratan Saudara akan diproses berdasarkan data proses penyelesaian keberatan. |
| Atas perhatian dan kerjasa | amanya diucapkan terima kasih. |
| , | a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
| . | (15) |
| | NIP(16) |

Tembusan: Direktur Jenderal Pajak



- 8 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN YANG PERTAMA

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.

Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan jenis dan masa/tahun ketetapan atau pemotongan/pemungutan pajak seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau bukti pemungutan.

Nomor (10): Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau bukti pemungutan.

Nomor (11): Diisi dengan pos yang dikoreksi seperti penjualan, biaya pemasaran, dll.

Nomór (12): Diisi dengan jumlah koreksi pos tersebut oleh pemeriksa.

Nomor (13): Diisi dengan jenis keterangan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta tempat akan disampaikannya keterangan.

Nomor (15): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



. 9 .

E. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN KEDUA:

Direktur Jenderal Pajak

| KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) |
|--|
| Nomor : S(2) Sifat :(4) Hal : Permintaan keterangan kedua |
| Yth(5) |
| Sehubungan dengan surat kami Nomor |
| Adapun permintaan keterangan yang masih harus Saudara penuhi terdidari: |
| I. keterangan sehubungan dengan koreksi(8) sebesar Rp(9 yang meliputi: 1 |
| II. dst. (sesuai dengan pos yang dikoreksi dan keterangan yang belum diterima) |
| Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada: nama : |
| paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim. |
| Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberika keterangan dimaksud, Surat Keberatan Saudara diproses berdasarkan data yan ada yang diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan. |
| Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. |
| a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
| NIP(13) Tembusan: |



- 10 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN KEDUA

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.

Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permintaan keterangan pertama.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permintaan keterangan pertama.

Nomor (8) : Diisi dengan pos yang dikoreksi seperti penjualan, biaya pemasaran, dll.

Nomor (9) : Diisi dengan jumlah koreksi pos tersebut oleh pemeriksa.

Nomor (10): Diisi dengan jenis keterangan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan disampaikannya keterangan.

Nomor (12): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (13): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

F. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN:

| | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1) |
|--|---|
| Nomor : S Sifat : Hal : Permintaan keter | (4) |
| Yth (5 | 5) |
| (7) h | n surat Saudara Nomor |
| yang meliputi: 1 2 3 | an dengan koreksi(11) sebesar Rp(12), |
| nama : | di atas agar disampaikan kepada: |
| keterangan dimaksud, sur | ka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan at keberatan Saudara akan diproses berdasarkan data dam proses penyelesaian keberatan. |
| Atas perhatian dan k | erjasamanya diucapkan terima kasih. |
| | a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK(16) |
| ė | NIP(17) |

Tembusan:

Direktur Jenderal Pajak



- 12 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.

Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan jenis dan masa/tahun ketetapan atau pemotongan/pemungutan pajak seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau bukti pemungutan.

Nomor (10): Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau bukti pemungutan.

Nomor (11): Diisi dengan pos yang dikoreksi seperti penjualan, biaya pemasaran,

Nomor (12): Diisi dengan jumlah koreksi pos tersebut oleh pemeriksa.

Nomor (13): Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

Nomor (14): Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan disampaikannya keterangan tambahan.

Nomor (15): Diisi dengan batas waktu peminjaman buku, catatan, data, dan informasi.

Nomor (16): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

ttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

HARTO ---

NIP 1959042019840210



LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

FORMAT BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUHNYA PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN:

| AND SIN |
|---------|
| |
| |
| |
| |

| KEN | MENTERIAN KEUANGAN R DIREKTORAT JENDI | ERAL PAJAK |
|--|--|--|
| BERITA ACARA TIDA PEMINJAN | K MEMENUHI SEBAGIÁN, IAN DAN/ATAU PERMINTA | /SELURUHNYA PERMINTAAN AAN KETERANGAN |
| | NOMOR BA | (2) |
| Pada hari ini | (3) tanggal | (4), kami: |
| Nama/NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan |
| (5) | (6) | (7) |
| | | |
| <u></u> | | |
| melakukan penelitian ter Nama : NPWP : atas Jenis Ketetapan/Pemotor Nomor Ketetapan/Pemotor Tanggal Ketetapan/Pemotor Masa/Tahun*) Pajak | hadap keberatan Wajib Pa (10) (11) ngan atau Pemungutan*) ongan atau Pemungutan*) tongan atau Pemungutan* | : |
| Bahwa berdasarkan sura | at permintaan peminiamar | siirat nermintaan neminiaman |

Bahwa berdasarkan surat permintaan peminjaman, surat permintaan peminjaman tambahan, surat permintaan keterangan, dan surat permintaan keterangan tambahan:

| No | Nomor Surat | Tanggal |
|------|-------------|---------|
| (16) | (17) | (18) |
| | | · |
| | | |
| | | |
| | | |

dengan ini diterangkan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi sebagian/seluruhnya*) atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi serta permintaan keterangan tersebut sehingga permohonan Wajib Pajak diproses menggunakan data yang ada,



Adapun pemenuhan atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi serta permintaan keterangan adalah sebagai berikut:

Pemenuhan Buku, Catatan, Data,

dan Informasi serta Keterangan

(21)

Buku, Catatan, Data, dan Informasi

yang Dipinjam serta Keterangan yang

Diminta

(20)

No.

(19)

| | <u> </u> |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian, an/atau Permintaan Keterangan ini dibua | /Seluruhnya*) Permintaan Peminjaman at dengan sebenar-benarnya. |
| | (9.9 |
| | (22 |
| lengetahui | Tim Peneliti |
| | Thir rememe |
| (23) | |
| • | (25) |
| | |
| | |
| (a) | |
| (24) | *************************************** |
| IP | NIP(26 |
| | • |
| | |
| | (25 |
| | |
| | |
| | • 1 |
| • | |
| | |
| | NIP(26 |
| | |
| | |
| | |
| , | (25 |
| • | (20 |
| | |
| | |
| · | |
| | • |
| | ATTD |
| | NIP(26 |



PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUHNYA PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara.

Nomor (3) : Diisi dengan hari pembuatan berita acara.

Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pembuatan berita acara.

Nomor (5) : Diisi dengan nama dan NIP peneliti.

Nomor (6) : Diisi dengan pangkat dan golongan peneliti.

Nomor (7) : Diisi dengan jabatan peneliti.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat tugas.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat tugas.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (12) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau

pemungutan seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 23.

Nomor (13) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/pemotongan atau

pemungutan.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak/pemotongan atau

pemungutan.

Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Keterangan *) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Nomor (16) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (17) : Diisi dengan nomor surat permintaan peminjaman, surat

permintaan peminjaman tambahan, surat permintaan keterangan, dan surat permintaan keterangan tambahan yang

telah dikirim.

Nomor (18) : Diisi dengan tanggal surat permintaan peminjaman, surat

permintaan peminjaman tambahan, surat permintaan keterangan, dan surat permintaan keterangan tambahan yang

telah dikirim.

Nomor (19) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (20) : Diisi dengan buku, catatan, data, dan informasi yang dipinjam

serta keterangan yang diminta berdasarkan surat permintaan peminjaman, surat permintaan peminjaman tambahan, surat permintaan keterangan, dan surat permintaan keterangan

tambahan.



-4-

Nomor (21) : Diisi dengan keterangan "YA" apabila dipenuhi atau "TIDAK"

apabila tidak dipenuhi.

Nomor (22) : Diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan berita acara.

Nomor (23) : Diisi dengan jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian

Keberatan.

Nomor (24) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

bersangkutan.

Nomor (25) : Diisi dengan jabatan tim peneliti.

Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP tim peneliti.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

BIRO UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEPALA BACTAN T.U. REMENTERIAN

GIAR (

NIP 1959042019840210



LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN:



| PERPAJAK | AN: | | , | ODIVORDITA |
|-----------------------|--|---|----------------|------------|
| | DI. | IAN KEUANGAN REPUE REKTORAT JENDERAL | PAJAK | IA |
| • | | | (2) | AJAKAN |
| | hari ini(3) | tanggal | (4), kami: | |
| . No | NAMA/NIP | Pangkat/Golong | gan Ja | abatan |
| (5) | (6) | (7) | | (8) |
| | - | | | |
| | | | | |
| dalam rang tanggal | gan Surat Tugas nomo ka pembahasan dan kla (12), telah me Wajib Pajak : | arifikasi sengketa perpa | ijakan nomor . | (11) |
| | | | | |

| | gal (12), telah melakukan pembahasai ratan Wajib Pajak : | |
|-------------|--|----------------------------------|
| Nam NPW | | |
| atas: | | |
| Nom Tang | s Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) or Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) ggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) a/Tahun*) Pajak | :(15) :(16) :(17) :(18) |
| Yang | g dihadiri oleh : | |
| 2 3 | | |
| _ | gan pembahasan dan klarifikasi sebagai berikut: . Pertanyaan : | |
| 2. | . Pertanyaan : | |
| 3. | Pertanyaan : | |
| 4. | • | dst. (20) |



- 2 -

| Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi S keberatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. | Sengketa Perpajakan dalam rangka |
|--|----------------------------------|
| *** *** ** * * * * * * * * * * * * * * * | (21) |
| Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*), | Tim Peneliti, |
| (22) | NIP(23) |
| | |
| | NIP(23) |



- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN

| Nomor (1) | : | Diisi dengan kepala surat. | |
|---------------|---|---|--|
| Nomor (2) | : | Diisi dengan nomor Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan. | |
| Nomor (3) | : | Diisi dengan hari pelaksanaan pembahasan dan klarifikasi. | |
| Nomor (4) | : | Diisi dengan tanggal pembahasan dan klarifikasi. | |
| Nomor (5) | : | Diisi dengan nomor urut. | |
| Nomor (б) | : | Diisi dengan nama dan NIP Tim Peneliti Keberatan. | |
| Nomor (7) | : | Diisi dengan pangkat dan golongan Tim Peneliti Keberatan. | |
| Nomor (8) | : | Diisi dengan nama anggota Tim Peneliti. | |
| Nomor (9) | : | Diisi dengan nomor Surat Tugas untuk melakukan penelitian. | |
| Nomor (10) | : | Diisi dengan tanggal Surat Tugas untuk melakukan penelitian. | |
| Nomor (11) | : | Diisi dengan nomor surat panggilan. | |
| Nomor (12) | : | Diisi dengan tanggal surat panggilan. | |
| Nomor (13) | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak. | |
| Nomor (14) | : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak. | |
| Nomor (15) | : | Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. | |
| Nomor (16) | : | Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan. | |
| Nomor (17) | : | Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan. | |
| Nomor (18) | : | Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak. | |
| Keterangan *) | : | Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. | |
| Nomor (19) | : | Diisi dengan nama-nama para pihak yang membahas, misal: Pemeriksa, Wajib Pajak/Wakil/Kuasa. | |
| Nomor (20) | : | Diisi dengan materi pembahasan dan klarifikasi. | |
| Nomor (21) | : | Diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan berita acara. | |
| Nomor (22) | : | Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa. | |
| Nomor (23) | : | Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Tim Peneliti. | |

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO <u>UM</u>UM MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

NIP 19590420198402100



LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR:

| | | ANGAN REPUBLIK AT JENDERAL PAJ | AK |
|---|---|---|---|
| | (2) Sangat segera | | (3) |
| Lampiran : Hal : : | (4) Surat Pemberitahuan Untuk | Hadir | |
| | (5) | | |
| Tugas nomor . | ngan dengan telah dilakukan (6) tanggal n daftar hasil penelitian keber | (7), bers | sama ini disampaikan |
| pajak yang ha secara tertulis yang menduku paling lama | at hasil penelitian keberatar arus dilaksanakan, Saudara sesuai formulir terlampir disc ang uraian dalam tanggapar 10 (sepuluh) hari kerja se chadiran Saudara guna mer la: | diberi kesempata ertai buku, catatan n tertulis tersebut etelah tanggal su | n untuk menanggapi n, data, atau informasi dalam jangka waktu rat ini dikirim, dan |
| Hari/Tanggal Waktu Tempat untuk menemu | : | | (8) (9) (10) (11) |
| dimaksûd, Su | dalam jangka waktu tersebut rat Keberatan Saudara tetaj penyelesaian keberatan. | | |
| Atas perl | hatian dan kerjasama Saudar | a, diucapkan terin | na kasih. |
| | | | UR JENDERAL PAJAK (12) |
| ₽ | | | |

Tembusan: Direktur Jenderal Pajak



- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi sesuai dengan jumlah lampiran.

Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas.

Nomor (8) : Diisi dengan hari dan tanggal pemberian penjelasan dan/atau

keterangan.

Nomor (9) : Diisi dengan waktu pemberian penjelasan dan/atau keterangan.

Nomor (10) : Diisi dengan tempat pemberian penjelasan dan/atau keterangan.

Nomor (11) : Diisi dengan nama pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan

memberikan penjelasan dan/atau diberikan keterangan.

Nomor (12) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (13): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.



- 3 -

| B. FO | RMAT PEMBERITA | HUAN D | AFTAR HASIL P | ENELITIAN K | EBERATAN: | |
|---------------|--|-------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| | | | ERIAN KEUANC DIREKTORAT J | IENDERAL P | AJAK | |
| | PEMBERITA | HUAN D | AFTAR HASIL F | PENELITIAN 1 | KEBERATAN | |
| Nomo Tangg | Ketetapan/Pemoto r Ketetapan/Pemot al Ketetapan/Pemo /Tahun*) Pajak | ongan at | tau Pemungutai | n*) an*) | :(2) :(3) :(4) :(5) | |
| | POS-POS YANG | | MENURUT | | DASAR DILAKUKAN | |
| NO | DIKOREKSI | WP | PEMERIKSA | PENELITI | KOREKSI DALAM | |
| (6) | (7) | (Rp) (8) | (Rp) | (Rp) | KEBERATAN | |
| (0) | (1) | (0) | (9) | (10) | (11) | |
| | | | 104 | H-substance | Priving Apply 1 | |
| | . , | | | | | |
| | | | | *** | | |
| Ĺ | | , | | | | |
| | , | | | •••••• | (12) | |
| Μe | engetahui, | | | Tim Peneliti | | |
| | (13) | | | (15) | | |
| | | | | | • | |
| | | | | | | |
| NII | P(14) | | NIP(16) | | | |
| · | | | | | | |
| • | | | (15) | | | |
| | • | | | | • | |
| | | | | ••••• | ••••• | |
| | | | | NIP | (16) | |
| | | | | | | |

.....(15)

NIP.....(16)



PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

: Diisi dengan kepala surat unit kantor yang bersangkutan.

dengan jenis surat ketetapan pajak/pemotongan pemungutan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Nomor (1)

Nomor (2)

: Diisi

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/pemotongan pemungutan. Nomor (4) tanggal surat ketetapan pajak/pemotongan : Diisi dengan pemungutan. Nomor (5) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak. : Diisi dengan nomor urut. Nomor (6) Nomor (7) : Diisi dengan pos-pos yang dikoreksi. : Diisi dengan jumlah menurut Wajib Pajak. Nomor (8) Nomor (9) : Diisi dengan jumlah menurut pemeriksa. Nomor (10): Diisi dengan jumlah menurut peneliti keberatan. Nomor (11): Diisi dengan dasar dilakukan koreksi dalam keberatan. pembuatan tanggal Nomor (12): Diisi dengan nama tempat dan pemberitahuan. Nomor (13): Diisi dengan jabatan pimpinan unit pelaksana penelitian keberatan. Nomor (14): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP jabatan pimpinan unit pelaksana penelitian keberatan. Nomor (15): Diisi dengan jabatan Tim Peneliti.

Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Tim Peneliti.



- 5 -

| C. FORMAT SURAT TA | ANGGAPAN HASI | L PENELITIAN KEI | 3ERATAN: | • | |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------|
| Yth | (1) | | | | |
| • | | | | | |
| Sehubungan (2) tang | _ | Pemberitahuan (3) dengan in | | Hadir | nomor |
| Nama NPWP Jabatan Alamat Nomor Telepon | : : : | | (4) (5) (6) (7) (8) | | |
| bertindak selaku | : Waji | b Pajak | | | |
| | Wak | il Kuas | a | | |
| | dari Wajib | Pajak | | | |
| | Nama NPWP Alamat | : : : | | (| |
| dengan ini memberi penelitian keberatan k | ami dengan urai | an sebagai berikut: | | | · |
| | | • | | | |
| | • | | | | |
| | | | | | (12) |
| | | | | | |
| • | | •••• | ••••••• | • | (13) |
| | | Waj | ib Pajak/ | Wakil/Kı | uasa*) |
| | | | .• | | |
| | | | | | |
| | | ••••• | | ************ | (14) |
| • | | | | | |
| *** | | | | | |
| Keterangan: 1. Beri tanda X pada | yang sesuai. | | | | |
| 2. *) Diisi dengan salah s | | | | | |
| 3. **) Diisi dengan salah s | atu yang sesuai da | n dalam hal surat tang | gapan hasil | penelitian | |

keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



- 6 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

| Nomor (1) | : | Diisi dengan nama dan alamat unit peneliti keberatan. |
|------------|---|--|
| Nomor (2) | : | Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian. |
| Nomor (3) | : | Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian. |
| Nomor (4) | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan. |
| Nomor (5) | : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan. |
| Nomor (6) | : | Diisi dengan jabatan Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan. |
| Nomor (7) | : | Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan. |
| Nomor (8) | : | Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan. |
| Nomor (9) | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (10) | : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (11) | : | Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (12) | : | Diisi dengan tanggapan Wajib Pajak terhadap hasil penelitian untuk masing-masing koreksi. |
| Nomor (13) | : | Diisi dengan kota dan tanggal surat tanggapan hasil penelitian keberatan dibuat. |
| Nomor (14) | : | Diisi dengan nama dan tanda tangan pembuat surat tanggapan hasil penelitian keberatan. |

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO <u>UM</u>UM

ttd.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

GIARTO*

NIP 195904201984021



LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS:

| | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1) | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| BEI | RITA ACARA KI | EHADIRAN | I DAN PEMBER | AN KETERAN | IGAN TERTULIS |
| | I | NOMOR : F | 3A | (2) | |
| n 1 1 . | 1 1. 1 | 11 | 0) to a real | | |
| | - | | 3) tanggal | | |
| No (5) | NAMA/NI | 2 | Pangkat/Go | | Jabatan |
| (5) | (6) | | · (7) | | (8) |
| | And residued in 1980 and 1997 of som | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 10 T (Lattice 1) de 10 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) | |
| | | | | | |
| melakuka Nama NPWP atas: Jenis Ket Nomor Ke Tanggal F Masa Paj | an penelitian k : : etapan/Pemotetetapan/Pemo Ketetapan/Pemo Ketetapan/Pemak/Tahun Paja | eberatan t ongan atau otongan ata otongan a | erhadap Wajib I a Pemungutan * au Pemungutan tau Pemungutan | Pajak: * *) : | (13) (14) (15) (16) |
| serta mei | nberitahukan | dan menje | laskan hasil per | nentian kepad | a: |
| Wa | ajib Pajak | Nama NPWP Jabatan Alamat | : | <u> </u> | uasa Wajib Pajak(17)(18)(19) |
| nomor | (21) | tanggal | (| 22), dan Waji | itahuan Untuk Hadir ib Pajak memberikan (23) tanggal |



Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

| | (25) |
|---------------------------|-------------------|
| Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*) | Tim Peneliti (29) |
| (26) Mengetahui,(27) | NIP(30) |
| | NIP(30) |



- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

| Nomor (1) : | Diisi dengan kepala surat. |
|-----------------|--|
| Nomor (2) | Diisi dengan nomor Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak. |
| Nomor (3) : | Diisi dengan hari kehadiran Wajib Pajak. |
| Nomor (4) : | Diisi dengan tanggal kehadiran Wajib Pajak. |
| Nomor (5) : | Diisi dengan nomor urut. |
| Nomor (6) : | Diisi dengan nama dan NIP tim peneliti. |
| Nomor (7) : | Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti. |
| Nomor (8) | Diisi dengan jabatan tim peneliti. |
| Nomor (9) : | Diisi dengan nomor Surat Tugas. |
| Nomor (10) : | Diisi dengan tanggal Surat Tugas. |
| Nomor (11) : | Diisi dengan nama Wajib Pajak. |
| Nomor (12) : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. |
| Nomor (13) : | Diisi dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. |
| Nomor (14) : | Diisi dengan nomor ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan. |
| Nomor (15) : | Diisi dengan tanggal ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan. |
| Nomor (16) : | Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak. |
| Keterangan *) : | Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. |
| Nomor (17) : | Diisi dengan nama Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (18) : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (19) : | Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (20) : | Diisi dengan alamat Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (21) : | Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. |
| Nomor (22) : | Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. |
| Nomor (23) : | Diisi dengan nomor surat keterangan tertulis Wajib Pajak. |
| Nomor (24) : | Diisi dengan tanggal surat keterangan tertulis Wajib Pajak. |
| Nomor (25) : | Diisi dengan nama tempat dan tanggal pembuatan berita acara. |
| Nomor (26) : | Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa. |
| Nomor (27) : | Diisi dengan jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian Keberatan. |
| Nomor (28) : | Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang bersangkutan. |
| Nomor (29) : | Diisi dengan jabatan tim peneliti. |
| | T 107770 / 1 |

Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP tim peneliti.

Nomor (30)



-4-

B. FORMAT BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR TETAPI TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS:

| MEMB | ERIKAN KETERANG | GAN TERTULIS: | |
|---|---|---|---|
| | KEMEI | NTERIAN KEUANGAN REPUBLIK IN DIREKTORAT JENDERAL PAJAI | |
| | | ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK MEMBERIKAN KETERANGAN TER | |
| | . NOMC | OR : BA (2) | ÷ |
| | | | |
| Pada hari | ini | (3) tanggal | : (4), kami : |
| No | NAMA/NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan |
| (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 445-146-146-146-146-146-146-146-146-146-146 | | |
| | | | |
| | ************************************** | | |
| melakuka Nama NPWP atas: Jenis Keta Nomor Ke Tanggal K Masa Paja | an penelitian kebera :etapan/Pemotongan etetapan/Pemotonga Ketetapan/Pemotong ak/Tahun Pajak *) | a nomor | (11) (12) (13) (14) (15) (16) |
| | | nenjelaskan hasil penelitian kepada | |
| Wa Wa | ijib Pajak | Wakil Wajib Pajak Kuas | sa Wajib Pajak |
| nomor memberfk | (21) tang kan keterangan tert | P :tan : | (18)(19)(20) ahuan Untuk Hadir Wajib Pajak tidak erangan secara lisan |



- 5 -

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Tetapi Tidak Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

| | (24) |
|---------------------------|-------------------|
| Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*) | Tim Peneliti (28) |
| (25) Mengetahui,(26) | NIP(29) |
| NIP(27) | NIP(29) |



-б-

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR TETAPI TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

| | | TIDING MIDINIDENCIAN TELEVISION |
|---------------|-----|--|
| Nomor (1) | : | Diisi dengan kepala surat. |
| Nomor (2) | : | Diisi dengan nomor Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak. |
| Nomor (3) | : | Diisi dengan hari kehadiran Wajib Pajak. |
| Nomor (4) | : | Diisi dengan tanggal kehadiran Wajib Pajak. |
| Nomor (5) | : | Diisi dengan nomor urut. |
| Nomor (б) | : | Diisi dengan nama dan NIP tim peneliti. |
| Nomor (7) | : | Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti. |
| Nomor (8) | : | Diisi dengan jabatan tim peneliti. |
| Nomor (9) | : | Diisi dengan nomor Surat Tugas. |
| Nomor (10) | : | Diisi dengan tanggal Surat Tugas. |
| Nomor (11) | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak. |
| Nomor (12) | : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. |
| Nomor (13) | : | Diisi dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan |
| | | seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. |
| Nomor (14) | : | Diisi dengan nomor ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan. |
| Nomor (15) | · : | Diisi dengan tanggal ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan. |
| Nomor (16) | : | Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak. |
| Keterangan *) | ; | Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. |
| Nomor (17) | : | Diisi dengan nama Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (18) | : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (19) | : | Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (20) | : | Diisi dengan alamat Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (21) | : | Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. |
| Nomor (22) | : | Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. |
| Nomor (23) | : | Diisi dengan keterangan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak memberikan keterangan secara lisan. |
| Nomor (24) | : | Diisi dengan nama, tempat, dan tanggal pembuatan berita acara. |
| Nomor (25) | : | Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa. |
| Nomor (26) | : | Diisi dengan jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian Keberatan. |
| Nomor (27) | : | Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang bersangkutan. |
| Nomor (28) | : | Diisi dengan jabatan tim peneliti. |

: Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP tim peneliti.

Nomor (29)



. 7 .

C. FORMAT BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TETAPI TIDAK BERSEDIA TANDA TANGAN.

| | KEME | NTERIAN KEUANGAN REPU DIREKTORAT JENDERA | L PAJAK |
|-----------------------|--|---|---------------------------|
| MEN | | ACARA KEHADIRAN WAJIB ANGAN TETAPI TIDAK BERS | |
| | | OR : BA | |
| Pada hari | i ini | (3) tanggal | (4), kami : |
| Йo | NAMA/NIP | Pangkat/Golongan | |
| (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nomor Ke Tanggal K | :etapan/Pemotonga etetapan/Pemotong | n atau Pemungutan *) : an atau Pemungutan *) : gan atau Pemungutan *) : | (12) (13) (14) |
| serta mer | nberitahukan dan 1 | menjelaskan hasil penelitian | kepada: |
| Wa | ajib Pajak Nam | Wakil Wajib Pajak | Kuasa Wajib Pajak (17) |
| | NPW Jaba Alan | TP : | (18 (19 (20 |
| | | undangan sesuai Surat P | |
| keteranga | n tertulis dalam | gal (22), da suratnya nomor | (23) tangga |
| | (24) dan/at | au keterangan secara | lisan sebagai beriku |
| | ******** | | . (05) |
| | | rsedia menandatangani Beri | (25), |



- 8 -

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Memberikan Keterangan Tetapi Tidak Bersedia Tanda Tangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

| | (26) |
|---------------------------|-------------------|
| Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*) | Tim Peneliti (30) |
| (27) Mengetahui,(28) | (31) |
| NIP(29) | |



-9-

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TETAPI TIDAK BERSEDIA TANDA TANGAN

| Nomor (1) | : | Diisi dengan kepala surat. |
|---------------|-----|--|
| Nomor (2) | : | Diisi dengan nomor Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak. |
| Nomor (3) | : | Diisi dengan hari kehadiran Wajib Pajak. |
| Nomor (4) | : | Diisi dengan tanggal kehadiran Wajib Pajak. |
| Nomor (5) | : | Diisi dengan nomor urut. |
| Nomor (6) | : | Diisi dengan nama dan NIP tim peneliti. |
| Nomor (7) | : | Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti. |
| Nomor (8) | : | Diisi dengan jabatan tim peneliti. |
| Nomor (9) | : | Diisi dengan nomor Surat Tugas. |
| Nomor (10) | : | Diisi dengan tanggal Surat Tugas. |
| Nomor (11) | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak. |
| Nomor (12) | : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. |
| Nomor (13) | : | Diisi dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. |
| Nomor (14) | : | Diisi dengan nomor ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan. |
| Nomor (15) | ·: | Diisi dengan tanggal ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan. |
| Nomor (16) | : | Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak. |
| Keterangan *) |) : | Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. |
| Nomor (17) | : | Diisi dengan nama Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (18) | : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (19) | : | Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (20) | : | Diisi dengan alamat Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. |
| Nomor (21) | : | Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. |
| Nomor (22) | : | Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. |
| Nomor (23) | : | Diisi dengan nomor surat keterangan tertulis Wajib Pajak. |
| Nomor (24) | : | Diisi dengan tanggal surat keterangan tertulis Wajib Pajak. |
| Nomor (25) | : | Diisi dengan keterangan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak memberikan keterangan secara lisan. |
| Nomor (26) | : | Diisi dengan nama, tempat, dan tanggal pembuatan berita acara. |
| Nomor (27) | : | Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa. |

: Diisi dengan jabatan pimpinan Unit

Keberatan.

Nomor (28)

Pelaksana Penelitian



- 10 -

Nomor (29)

dan NIP pejabat yang : Diisi dengan tanda tangan, nama,

bersangkutan.

Nomor (30)

: Diisi dengan jabatan tim peneliti.

Nomor (31)

: Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP tim peneliti.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

u.b KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTÓ

NIP 1950042019840210

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

₹

| | MAT BERITA ACAR IBERIKAN KETERANC | A KETIDAKHADIRAN AN TERTULIS: | WAJIB | PAJAK | DAN | TIDA |
|---------|--------------------------------------|--|----------|-------|---------|---------|
| | KEMEN | TERIAN KEUANGAN R DIREKTORAT JENDE | ERAL PAC | JAK | SIA | |
| | | RA KETIDAKHADIRAN EMBERIKAN KETERAN | | | | |
| | NOMO | R : BA | (2) | `. | | |
| Pada ha | ri ini | (3) tanggal | | (4), | kami : | |
| No | NAMA/NIP | Pangkat/Golon | gan | | Jabatai | n. |
| (5) | (6) | (7) | • | | (8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | ****** | | · | |
| , | | | | | | |
| | | | | | | |
| | kan penelitian keberat | nomor(9 an terhadap Wajib Paja | k: | (11) | (10) | , telal |
| atas: | • | | | | | |
| | | atau Pemungutan*) | | | | , , |
| Nomor K | Ketetapan/Pemotonga | n atau Pemungutan*) | | | | (14) |
| Tanggal | Ketetapan/Pemotonga | an atau Pemungutan*) | • . | | | (15) |
| | ahun*) Pajak | | | | | |

telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor(17) tanggal(18) terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan tidak memberikan keterangan tertulis.



Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

| | (19) |
|---------------------------|------------------|
| Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*) | Tim Peneliti(23) |
| (20) | NIP(24) |
| Mengetahui, (21) | (23) |
| | NIP(24) |



PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DAN TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.

Nomor (3) : Diisi dengan hari seharusnya Wajib Pajak hadir.

Nomor (4) : Diisi dengan tanggal seharusnya Wajib Pajak hadir.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (6) : Diisi dengan nama dan NIP tim peneliti.

Nomor (7) : Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti.

Nomor (8) : Diisi dengan jabatan tim peneliti.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas.

Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan

seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Nomor (14) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/pemotongan atau

pemungutan.

Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak/pemotongan atau

pemungutan.

Keterangan *): Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Nomor (16) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Nomor (17) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

Nomor (18) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

Nomor (19) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal pembuatan berita acara.

Nomor (20) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/wakil/kuasa.

Nomor (21) : Diisi dengan jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian

Keberatan.

Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

bersangkutan.

Nomor (23) : Diisi dengan jabatan tim peneliti.

Nomor (24) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP tim peneliti.



B. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS:

Masa/Tahun*) Pajak

| | KEMEN | ITERIAN KEUANGAN REPUBLIK IN DIREKTORAT JENDERAL PAJAI (1) | |
|----------|---|--|-------------|
| | | RA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJ BERIKAN KETERANGAN TERTULI | |
| | NOMO | R:BA(2) | |
| | | | • |
| Pada har | i ini | (3) tanggal | (4), kami : |
| No | NAMA/NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan |
| (5) | (6) | (7) | . (8) |
| | | | |
| | WF-90-496-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- | | |
| | | | |
| | • | | |
| | - | | |
| | an penelitian keberat | s nomor(9) tanggal an terhadap Wajib Pajak: | (11) |
| atas: | | | · |
| Nomor K | etetapan/Pemotonga | atau Pemungutan *) : n atau Pemungutan *) : an atau Pemungutan *): | (14) |

telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor(17) tanggal(18) terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan memberikan keterangan tertulis

dalam surat nomor(19) tanggal(20).

:(16)



Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

| Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*) | (21) Tim Peneliti(25) | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|--|
| (22) Mengetahui, (23) | (26) | | |
| NIP (24) | NIP(26) | | |
| | (25) | | |



PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.

Nomor (3) : Diisi dengan hari seharusnya Wajib Pajak hadir.

Nomor (4) : Diisi dengan tanggal seharusnya Wajib Pajak hadir.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (6) : Diisi dengan nama dan NIP tim peneliti.

Nomor (7) : Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti.

Nomor (8) : Diisi dengan jabatan tim peneliti.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas.

Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan

seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Nomor (14) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan.

Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak/pemotongan atau

pėmungutan.

Keterangan *): Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Nomor (16) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Nomor (17) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

Nomor (18) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

Nomor (19) : Diisi dengan nomor surat keterangan Wajib Pajak.

Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keterangan Wajib Pajak.

Nomor (21) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal pembuatan berita acara.

Nomor (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/wakil/kuasa.

Nomor (23) : Diisi dengan jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian Keberatan.

Nomor (24) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

bersangkutan.

Nomor (25) : Diisi dengan jabatan tim peneliti.



Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP tim peneliti.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIART

NIP 1959042019840210

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN ORANG PRIBADI:

| BADAN | IJ₽ | IN ORANG PRIBADI: |
|------------|-----|--|
| | | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA |
| | | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP(1) TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS(2) |
| | | DIREKTUR JENDERAL PAJAK, |
| Menimbang | : | a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas nama(3) nomor(4) tanggal(5) yang diterima(6) tanggal(7) berdasarkan LPAD nomor(8) tanggal(9) tentang(10) atas(11) nomor(12) tanggal(13) Tahun Pajak(14); b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor(15) tanggal(16); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas(17); |
| Mengingat | : | |
| Menetapkan | : | MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATA |
| | | WAJIB PAJAK ATAS (21). |
| PERTAMA | : | Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak (22 keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor |
| | | Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah (25) jumlah paja yang masih harus dibayar/jumlah pajak yang lebih dibayar dalar (26) nomor(27) tanggal(28) Tahun Paja (29). |

| atas: | | |
|-------------|---|------|
| Wajib Pajak | : | (30) |
| NPWP | | (31) |
| Alamat | | (32) |
| | | , , |



. 2 .

Dengan perincian sebagai berikut:

| Dengan permeian sebagai benkut | Semula | Ditambah/ | Menjadi |
|--------------------------------|--------|-------------|---|
| ·Uraian | (Rp) | (Dikurangi) | (Rp) |
| | | (Rp) | (1 / |
| | (33) | (34) | (35) |
| a. Penghasilan Netto | | ***** | |
| b. Kompensasi Kerugian | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| c. Penghasilan Kena Pajak | | | |
| d. Pajak Penghasilan (PPh) | | | |
| Terutang | | | , |
| e. Kredit Pajak | | | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
| f. PPh Kurang/(Lebih) Bayar | | | |
| g. Sanksi Administrasi | | | |
| h. Jumlah PPh yang masih | | | |
| harus/(lebih) dibayar | | | |

Perhitungan PPh yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan: (36)

| Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar | (37) |
|---|------|
| Jumlah lebih bayar PPh berdasarkan SKPLB | (38) |
| Jumlah PPh yang masih harus dilunasi | (39) |

| | · |
|-------|---|
| KEDUA | : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan |
| | Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: |
| • | 1 |
| | 2 |
| | 3dst (40) |
| | |
| 1 | (41) |
| | a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
| | (42) |
| | |
| | |
| | (43) |



- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN ORANG PRIBADI

Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan.

Nomor (2) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima Surat

Keberatan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan

Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor LPAD. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal LPAD.

Nomor (10) : Diisi dengan keberatan Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. Nomor (12) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan keberatan.

Nomor (13) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan keberatan.

Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan keberatan. Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Laporan Penelitian Keberatan. Nomor (16) : Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan.

Nomor (17): Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan

sebagaimana Nomor (2).

Nomor (18): Diisi dengan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4999)".

Nomor (19): Diisi dengan: "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4893)".

Nomor (20) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Nomor (21) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan

sebagaimana Nomor (2).

Nomor (22) : Diisi dengan salah satu yang sesuai.

Nomor (23) : Diisi dengan nomor surat keberatan Wajib Pajak. Nomor (24) : Diisi dengan tanggal surat keberatan Wajib Pajak.

Nomor (25) : Diisi dengan salah satu yang sesuai.

Nomor (26) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan sebagaimana Nomor (11).

Nomor (27) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan keberatan sebagaimana Nomor (12).



-4-

- Nomor (28) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan keberatan sebagaimana Nomor (13).
- Nomor (29) : Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan keberatan sebagaimana Nomor (14).
- Nomor (30) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (31) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (32) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (33) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- Nomor (34) : Diisi dengan jumlah koreksi sesuai dengan hasil penelitian keberatan.
- Nomor (35) : Diisi dengan jumlah sesuai dengan keputusan keberatan.
- Nomor (36): Perhitungan dalam Nomor (37), (38), dan (39) diisi dalam hal keberatan diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan terdapat jumlah pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
- Nomor (37) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus/(lebih) dibayar sesuai dengan keputusan keberatan (jumlah pada baris h kolom 35).
- Nomor (38) : Diisi dengan jumlah lebih bayar Pajak Penghasilan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan.
- Nomor (39) : Diisi dengan hasil perhitungan Nomor (37) ditambah Nomor (38).

Contoh 1:

Diterbitkan SKPLB Rp100.000.000,00 dan telah dikembalikan. Berdasarkan keputusan keberatan, jumlah lebih bayar menjadi sebesar Rp30.000.000, maka perhitungan PPh yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan adalah sebagai berikut:

Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar(Rp30.000.000,00)PPh yang telah dikembalikanRp100.000.000,00Jumlah PPh yang masih harus dilunasiRp70.000.000,00

Contoh 2:

Diterbitkan SKPLB Rp100.000.000,00 dan telah dikembalikan. Berdasarkan keputusan keberatan, jumlah PPh yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp80.000.000, maka perhitungan PPh yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan adalah sebagai berikut:

Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar Rp80.000.000,00 PPh yang telah dikembalikan Rp100.000.000,00 Jumlah PPh yang masih harus dilunasi Rp180.000.000,00

- Nomor (40) : Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- Nomor (41) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.
- Nomor (42) : Diisi dengan jabatan pimpinan unit pelaksana penelitian Keberatan.
- Nomor (42) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pimpinan unit pelaksana penelitian Keberatan.



- 5 -

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

| | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP(1) |
|--------------|---|
| · | TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS(2) |
| | DIREKTUR JENDERAL PAJAK, |
| Menimbang : | a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas nama(3) nomor(4) tanggal(5) yang diterima(6) tanggal(7) berdasarkan LPAD nomor(8) tanggal(9) tentang(10) atas(11) nomor(12) tanggal(13) Masa/Tahun*) Pajak(14); |
| | b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor |
| | (15) tanggal(16); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas(17); |
| Mengingat : | |
| | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan : | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS (21). |
| PERTAMA : | 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak (22) keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor(23) tangga(24). |
| | Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah (25) jumlah pajak yang masih harus dibayar/jumlah pajak yang lebih dibayar dalam (26) nomor(27) tanggal(28) Masa/Tahun*) Pajak (29). |
| | atas: Wajib Pajak :(30) NPWP :(31) Alamat :(32) |



- 6 **-**

Dengan perincian sebagai berikut:

| Uraian | Semula (Rp) | Ditambah/ (Dikurangi) | Menjadi (Rp) |
|-----------------------------|----------------|---|-----------------|
| | (33) | (Rp) (34) | (05) |
| a. Dasar Pengenaan Pajak | (30) | (34) | (35) |
| b. Pajak Penghasilan (PPh) | | | |
| Terutang | | | |
| c. Kredit Pajak | | | |
| d. Kompensasi Masa/Tahun*) | | | |
| Pajak sebelumnya | | | |
| e. PPh Kurang/(Lebih) Bayar | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| f. Sanksi Administrasi | | • | |
| g. Jumlah PPh yang masih | | TANKA | |
| harus/(lebih) dibayar | | | |

| | 1-1-1 |
|-------|--|
| KEDUA | : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
| | Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1 |
| | 2 |
| , | 3dst (36) |
| | a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
| | , (38) |
| | |
| \$ | (39) |



PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

| Nomor (1) | : Diisi dengan nomor Keputusan. |
|---------------|--|
| Nomor (2) | : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. |
| Nomor (3) | : Diisi dengan nama Wajib Pajak. |
| Nomor (4) | : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. |
| Nomor (5) | : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. |
| Nomor (6) | : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima Surat |
| \ / | Keberatan Wajib Pajak. |
| Nomor (7) | : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor |
| | Pelayanan Pajak. |
| Nomor (8) | : Diisi dengan nomor LPAD. |
| Nomor (9) | : Diisi dengan tanggal LPAD. |
| Nomor (10) | : Diisi dengan keberatan Wajib Pajak. |
| Nomor (11) | : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. |
| Nomor (12) | : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan keberatan. |
| Nomor (13) | : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan keberatan. |
| Nomor (14) | : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan keberatan. |
| Nomor (15) | : Diisi dengan nomor Laporan Penelitian Keberatan. |
| Nomor (16) | : Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan. |
| Nomor (17) | : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan |
| 11011101 (17) | sebagaimana Nomor (2). |
| Nomor (18) | : Diisi dengan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang |
| 11011101 (10) | Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara |
| | Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran |
| | Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah |
| , | beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor, 16 |
| | Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 |
| | |
| | Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)". |
| Nomor (10) | , |
| Nomor (19) | : Diisi dengan: "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak |
| | Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 |
| \$ | Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |
| | Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir |
| | dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara |
| | Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran |
| Nomar (20) | Negara Republik Indonesia Nomor 4893)". |
| Nomor (20) | : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang |
| | Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para |
| Mars an (O1) | Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku. |
| Nomor (21) | : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan |
| NI (OO) | sebagaimana Nomor (2). |
| Nomor (22) | : Diisi dengan salah satu yang sesuai. |
| Nomor (23) | : Diisi dengan nomor surat keberatan Wajib Pajak. |
| Nomor (24) | : Diisi dengan tanggal surat keberatan Wajib Pajak. |
| Nomor (25) | : Diisi dengan salah satu yang sesuai. |
| Nomor (26) | : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan |
| Manage (00) | sebagaimana Nomor (11). |
| Nomor (27) | : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan keberatan |

: Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan keberatan

sebagaimana Nomor (12).

Nomor (27)

O.



- 8 -

| Disi dengan tangga ketetapan pajak yang diajukan keberatan |
|---|
| sebagaimana Nomor (13). |
| : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan keberatan |
| sebagaimana Nomor (14). |
| : Diisi dengan nama Wajib Pajak. |
| : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. |
| : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. |
| : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam ketetapan |
| pajak atau pemotongan/pemungutan. |
| : Diisi dengan jumlah koreksi sesuai dengan hasil penelitian |
| keberatan. |
| : Diisi dengan jumlah sesuai dengan keputusan keberatan. |
| : Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan |
| Keberatan. |
| : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keputusan Keberatan |
| diterbitkan. |
| : Diisi dengan jabatan pimpinan unit pelaksana penelitian |
| Keberatan. |
| : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pimpinan unit |
| pelaksana penelitian Keberatan. |
| : Diisi dengan salah satu yang sesuai. |
| |



_ 9 .

C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

| KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP(1) TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS(2) | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | DIREKTUR JENDERAL PAJAK, | | | |
| Menimbang | : | | bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas nama(3) nomor(4) tanggal(5) yang diterima(6) tanggal(7) berdasarkan LPAD nomor(8) tanggal(9) tentang(10) atas(11) nomor(12) tanggal(13) Masa Pajak(14); | | | |
| | | | bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor | | | |
| | | | (15) tanggal(16); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas (17); | | | |
| Mengingat | : | 2.3.4. | | | | |
| MEMUTUSKAN: | | | | | | |
| Menetapkan | : | | UTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN IB PAJAK ATAS (21). | | | |
| PERTAMA | : | | Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak (22) keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor(23) tanggal(24). | | | |
| | | | Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah (25) jumlah pajak yang masih harus dibayar/jumlah pajak yang lebih dibayar dalam(26) nomor(27) tanggal(28) Masa Pajak(29). | | | |
| | | atas: Wajik NPW Alam | o Pajak :(30) P :(31) | | | |



- 10 -

| (Rp) | (Dikura (Rp (34 | U , | Menjad (Rp) |
|--|---|--|------------------------------|
| (33) | (Rp | U , | (|
| (33) | (34 | | |
| | |) | (35) |
| | | | |
| | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | • |
| | | | |
| - | , | | |
| kan harus dilunas: | į . | | (38 (39 |
| | | | napkan |
| | | | • |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | ····, ······ | | (41) |
| | | | |
| *********** | •••••••••• | • • • • • • • • | , (42) |
| | | | , (12) |
| | balikan : (36) harus/(lebih) o kan harus dilunas: alai berlaku pa al ini disampa .n. DIREKTUR | harus/(lebih) dibayar kan harus dilunasi lai berlaku pada tangga al ini disampaikan kepa .n. DIREKTUR JENDER | harus/(lebih) dibayar kan |

KEDUA



- 11 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

| Nomor (1) | : | Diisi dengan nomor Keputusan. |
|----------------|---|---|
| Nomor (2) | | Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. |
| Nomor (3) | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak. |
| Nomor (4) | : | Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. |
| Nomor (5) | : | Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. |
| Nomor (6) | | Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima Surat |
| ` ' | | Keberatan Wajib Pajak. |
| Nomor (7) | | Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor |
| . , , | | Pelayanan Pajak. |
| Nomor (8) | | Diisi dengan nomor LPAD. |
| Nomor (9) | | Diisi dengan tanggal LPAD. |
| Nomor (10) | | Diisi dengan keberatan Wajib Pajak. |
| Nomor (11) | | Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. |
| Nomor (12) | | Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan keberatan. |
| Nomor (13) | | Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan keberatan. |
| Nomor (14) | | Diisi dengan Masa Pajak yang diajukan keberatan. |
| Nomor (15) | | Diisi dengan nomor Laporan Penelitian Keberatan. |
| Nomor (16) | | Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan. |
| Nomor (17) | | Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan |
| () | | sebagaimana Nomor (2). |
| Nomor (18) | | Diisi dengan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang |
| 1.011101 (1.0) | | Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara |
| | | Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran |
| | | Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah |
| • | | beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 |
| | | Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 |
| | | |
| | | Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |
| Noman (10) | | Nomor 4999)". |
| Nomor (19) | | Diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang |
| | | Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan |
| • | | Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |
| | | 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |
| | | Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir |
| | | dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara |
| • | | Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran |
| | | Negara Republik Indonesia Nomor 5069)". |
| Nomor (20) | | Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang |
| | | Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para |
| | | Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku. |
| Nomor (21) | | Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan |
| ě | | sebagaimana Nomor (2). |
| Nomor (22) | | Diisi dengan salah satu yang sesuai. |
| Nomor (23) | | Diisi dengan nomor surat keberatan Wajib Pajak. |
| Nomor (24) | | Diisi dengan tanggal surat keberatan Wajib Pajak. |
| Nomor (25) | | Diisi dengan salah satu yang sesuai. |
| Nomor (26) | | Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan |
| | • | sebagaimana Nomor (11) |

sebagaimana Nomor (11).



- 12 -

: Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan keberatan Nomor (27) sebagaimana Nomor (12). : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan keberatan Nomor (28) sebagaimana Nomor (13). Diisi dengan Masa Pajak yang diajukan keberatan sebagaimana Nomor (29) Nomor (14). Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (30) Nomor (31) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (32) Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (33) Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam ketetapan pajak. Diisi dengan jumlah koreksi sesuai dengan hasil penelitian Nomor (34) keberatan. Diisi dengan jumlah sesuai dengan keputusan keberatan. Nomor (35) Nomor (36) Perhitungan dalam Nomor (37), (38), dan (39) diisi dalam hal keberatan diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan terdapat jumlah pajak yang seharusnya tidak dikembalikan. Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Nomor (37) atas Barang Mewah*) yang masih harus/(lebih) dibayar sesuai dengan keputusan keberatan (jumlah pada baris d kolom 35). Diisi dengan jumlah lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Nomor (38) Penjualan atas Barang Mewah*) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. Diisi dengan hasil perhitungan Nomor (37) ditambah Nomor (38). Nomor (39) Contoh 1: Diterbitkan SKPLB Rp100.000.000,00 dan telah dikembalikan. Berdasarkan keputusan keberatan, jumlah lebih bayar menjadi sebesar Rp30.000.000, maka perhitungan PPN/PPnBM yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan adalah sebagai berikut: Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar (Rp30.000.000,00) PPN yang telah dikembalikan Rp100.000.000,00 Jumlah PPN yang masih harus dilunasi Rp70.000.000,00 Contoh 2: Diterbitkan SKPLB Rp100.000.000,00 dan telah dikembalikan. Berdasarkan keputusan keberatan, jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp80.000.000, maka perhitungan PPN yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan adalah sebagai berikut:

Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar

Jumlah PPN yang masih harus dilunasi

PPN yang telah dikembalikan

Nomor (40)

: Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan

Keberatan.

Nomor (41)

Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.

Rp80.000.000,00

Rp100.000.000,00

Rp180.000.000,00



- 13 -

: Diisi dengan jabatan pimpinan unit pelaksana penelitian Nomor (42)

Keberatan.

Nomor (43) Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pimpinan unit pelaksana penelitian Keberatan.

Keterangan *) Diisi dengan salah satu yang sesuai.



- 14 -

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN OLEH PIHAK KETIGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

| | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP(1) TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS(2) |
|--------------|---|
| | DIREKTUR JENDERAL PAJAK, |
| Menimbang | : a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas nama(3) nomor(4) tanggal(5) yang diterima(6) tanggal(7) berdasarkan LPAD nomor(8) tanggal(9) tentang(10) atas(11) nomor(12) tanggal(13) Masa/Tahun*) Pajak(14); |
| | b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor(15) tanggal(16); |
| | c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas |
| Mengingat | 1 |
| | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan : | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS (21). |
| PERTAMA : | 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak (22) keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor(23) tanggal(24). |
| | 2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah (25) jumlah pajak yang dipotong/dipungut dalam(26) nomor(27) tanggal(28) Masa/Tahun*) Pajak(29). |
| | atas: Wajib Pajak :(30) NPWP :(31) Alamat :(32) |



- 15 -

Dengan perincian sebagai berikut :

| | Semula | Ditambah/ | Menjadi |
|--------------------------|--------|-------------|---------|
| ⁻ Uraian | (Rp) | (Dikurangi) | (Rp) |
| · | | (Rp) | |
| | (33) | (34) | (35) |
| a. Dasar Pengenaan Pajak | | | |
| b. Tarif (%) | | | |
| c. Jumlah Pajak yang | | | |
| dipotong/dipungut | | | , |

| | c. Jumlah Pajak yang dipotong/dipungut |
|---------|---|
| KEDUA . | Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan |
| | Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1 |
| | a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK , (38) |
| , | (39) |



- 16 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN OLEH PIHAK KETIGA

Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan. Diisi dengan jenis bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang Nomor (2) diajukan keberatan. Nomor (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. Nomor (4) Nomor (5) Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima Surat Nomor (6) Keberatan Wajib Pajak. Nomor (7) Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak. Nomor (8) Diisi dengan nomor LPAD. Nomor (9) Diisi dengan tanggal LPAD. Nomor (10) Diisi dengan keberatan Wajib Pajak. Diisi dengan jenis bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang Nomor (11) diajukan keberatan. : Diisi dengan nomor bukti pemotongan atau pemungutan pajak Nomor (12) yang diajukan keberatan. Diisi dengan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan pajak Nomor (13) yang diajukan keberatan. Diisi dengan Masa/Tahun Pajak pemotongan atau pemungutan Nomor (14) pajak yang diajukan keberatan. : Diisi dengan Nomor Laporan Penelitian Keberatan. Nomor (15) Nomor (16) Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan. Nomor (17) Diisi dengan jenis bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang diajukan keberatan sebagaimana Nomor (2). Diisi dengan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Nomor (18) Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Nomor (19) : Pilih salah satu.

4999)".

a. Dalam hal Pajak Penghasilan diisi dengan: "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".

Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- b. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)".
- Nomor (20) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (21) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan sebagaimana Nomor (2).
- Nomor (22) : Diisi dengan salah satu yang sesuai.

 Nomor (23) : Diisi dengan nomor surat keberatan Waiil
- Nomor (23) : Diisi dengan nomor surat keberatan Wajib Pajak.

 Nomor (24) : Diisi dengan tanggal surat keberatan Wajib Pajak.
- Nomor (25) : Diisi dengan salah satu yang sesuai.
- Nomor (26) : Diisi dengan jenis bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang diajukan keberatan sebagaimana Nomor (11).
- Nomor (27) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang diajukan keberatan sebagaimana Nomor (12).
- Nomor (28) : Diisi dengan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang diajukan keberatan sebagaimana Nomor (13).
- Nomor (29) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan keberatan sebagaimana Nomor (14).
- Keterangan*) : Diisi dengan salah satu yang sesuai.
- Nomor (30) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

 Nomor (31) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (32) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (33) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- Nomor (34) : Diisi dengan jumlah koreksi sesuai dengan hasil penelitian keberatan.
- Nomor (35) : Diisi dengan jumlah sesuai dengan keputusan keberatan.
- Nomor (36) : Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- Nomor (37) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.
- Nomor (38) : Diisi dengan jabatan pimpinan unit pelaksana penelitian Keberatan.



- 18 -

: Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pimpinan unit Nomor (39) pelaksana penelitian Keberatan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO